

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir, dkk 2008).

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, menurut (Chambers, 2005:111) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

*World Bank* (Bank Dunia) dalam *World Bank Institute* (2005) menjelaskan bahwa menurut Bank Dunia, kemiskinan adalah deprivasi dalam kesejahteraan. Berdasarkan definisi tersebut kemiskinan dapat dipandang dari beberapa sisi. Kemiskinan dipandang dari sisi moneter, dimana kemiskinan diukur dengan membandingkan pendapatan/konsumsi individu dengan beberapa batasan tertentu, jika mereka berada di bawah batasan tersebut, maka mereka dianggap miskin. Pandangan mengenai kemiskinan berikutnya adalah bahwa kemiskinan tidak hanya sebatas ukuran moneter, tetapi juga mencakup miskin nutrisi yang diukur dengan memeriksa apakah pertumbuhan anak-anak terhambat. Selain itu, juga bisa dari miskin pendidikan, misalnya dengan menggunakan indikator angka buta huruf. Selanjutnya pandangan yang lebih luas mengenai kemiskinan adalah kemiskinan ada jika masyarakat kekurangan kemampuan dasar, sehingga pendapatan dan pendidikan yang dimiliki tidak memadai atau kesehatan yang buruk, atau ketidakamanan, atau kepercayaan diri yang rendah, atau rasa ketidakberdayaan, atau tidak adanya hak bebas berpendapat. Berdasarkan pandangan ini, kemiskinan adalah fenomena multidimensi, dan solusi untuk mengatasinya tidaklah sederhana.

Menurut Todaro dan Smith (2006:117), kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut:

- 1) Tingkat pendapatan nasional negara berkembang terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
- 2) Pendapatan perkapita negara rendah dan pertumbuhannya sangat lambat
- 3) Distribusi pendapatan sangat timpang

- 4) Mayoritas penduduk di negara berkembang hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
- 5) Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas
- 6) Fasilitas pendidikan di negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif kurang memadai.

Dalam mengukur kemiskinan di Indonesia, BPS menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Masyarakat digolongkan ke dalam penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Garis kemiskinan non makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Syarat utama di banyak negara bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tepat adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan berarti bagi penurunan

masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan (Wongdesmiwati, 2009).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat karya. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat modal (Siregar dan Wahyuniarti, 2008).

Provinsi Jawa Timur adalah provinsi yang terletak di bagian timur Pulau Jawa, dimana jumlah penduduk provinsi ini menempati urutan kedua setelah provinsi Jawa Barat. Selain itu, ibu kota provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya dinobatkan sebagai kota metropolitan terbesar kedua setelah Kota DKI Jakarta. Provinsi Jawa Timur juga merupakan salah satu provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di Indonesia. Pada tahun 2013 tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 6,55%. Selain itu wilayah Jawa Timur secara ekonomi menyumbang lebih kurang 15% dari perekonomian nasional. Besarnya kegiatan ekonomi di Jawa Timur ini disebabkan tingginya arus perdagangan barang dan jasa yang memiliki peran penting dalam perekonomian

Jawa Timur. Tabel 1.1 merupakan data pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama periode 2008-2013:

Tabel 1.1  
Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur dan Nasional  
Tahun 2008-2013 (%)

<b>Tahun</b>	<b>Pertumbuhan Jatim</b>	<b>Pertumbuhan Nasional</b>	<b>Kontribusi Jatim *)</b>
2008	5,94	5,74	14,55
2009	5,01	4,77	14,76
2010	6,68	6,14	14,71
2011	7,22	6,35	14,68
2012	7,27	6,28	14,89
2013	6,55	5,90	14,87

Sumber: BPS (<http://www.bps.go.id/>)

\*) *Persentase PDRB Jatim terhadap total PDRB seluruh provinsi di Indonesia*

Untuk mengetahui kondisi perekonomian makro Jawa Timur di antara provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, berikut adalah rincian PDRB menurut harga konstan 2000 provinsi-provinsi di Pulau Jawa periode tahun 2008-2013 (pada Tabel 1.2 halaman 6). Melalui indikator makro, PDRB Jawa Timur terus mengalami kenaikan dari 305.538,69 milyar rupiah pada tahun 2008, meningkat hingga 419.428,45 milyar rupiah pada tahun 2013. Jumlah PDRB Jawa Timur masih berada di bawah provinsi DKI Jakarta. Posisi tertinggi ditempati DKI Jakarta, pada tahun 2013 mencapai 477.285,25 milyar rupiah. Selanjutnya Jawa Timur dan Jawa Barat, masing-masing sebesar 419.428,45 milyar rupiah dan 386.838,84 milyar rupiah pada tahun 2013.



Tabel 1.2  
PDRB Menurut Harga Konstan 2000 Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa  
Tahun 2008-2013 (Milyar Rupiah)

Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012	2013
DKI Jakarta	353.723,39	371.469,50	395.622,44	422.242,25	449.805,42	477.285,25
Jawa Barat	291.205,84	303.405,25	322.223,82	343.193,56	364.752,40	386.838,84
Jawa Tengah	168.034,48	176.673,46	186.992,99	198.270,12	210.848,42	223.099,74
DI Yogyakarta	19.212,48	20.064,26	21.044,04	22.131,77	23.308,56	24.567,48
<b>Jawa Timur</b>	<b>305.538,69</b>	<b>320.861,17</b>	<b>342.280,76</b>	<b>366.983,28</b>	<b>393.662,85</b>	<b>419.428,45</b>
Banten	79.700,68	83.453,73	88.552,19	94.198,17	99.992,41	105.856,07
Jawa	1.217.415,56	1.275.927,36	1.356.716,23	1.447.019,15	1.542.370,06	1.637.075,83
Indonesia	1.999.046,59	2.094.358,01	2.222.986,86	2.364.158,63	2.512.723,38	2.661.070,76

Sumber: BPS (<http://www.bps.go.id/>)

Dari peningkatan PDRB masing-masing provinsi di Pulau Jawa yang telah ditunjukkan pada Tabel 1.2, maka dapat dihitung Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Konstan 2000 Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Periode Tahun 2008-2013 pada Tabel 1.3 halaman 7.

Berdasarkan Tabel 1.3 halaman 7, rata-rata laju pertumbuhan PDRB tertinggi adalah Provinsi Jawa Timur, yakni sebesar 6,45%. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus performa pertumbuhan ekonomi Jatim merupakan pertumbuhan tertinggi dibandingkan semua provinsi di Pulau Jawa. Contoh, DKI Jakarta hanya tumbuh 6,19%, Jawa Barat 5,91%, Jawa Tengah 5,80%, Provinsi Banten 5,83% dan Provinsi D.I. Yogyakarta 5,04%.

Tabel 1.3.  
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Konstan 2000 Di Pulau Jawa  
Tahun 2008-2013 (%)

Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
DKI Jakarta	6,23	5,02	6,50	6,73	6,53	6,11	6,19
Jawa Barat	6,21	4,19	6,20	6,51	6,28	6,06	5,91
Jawa Tengah	5,61	5,14	5,84	6,03	6,34	5,81	5,80
DI Yogyakarta	5,03	4,43	4,88	5,17	5,32	5,40	5,04
<b>Jawa Timur</b>	<b>5,94</b>	<b>5,01</b>	<b>6,68</b>	<b>7,22</b>	<b>7,27</b>	<b>6,55</b>	<b>6,45</b>
Banten	5,77	4,71	6,11	6,38	6,15	5,86	5,83
Jawa	6,02	4,81	6,33	6,66	6,59	6,14	6,09
Indonesia	5,74	4,77	6,14	6,35	6,28	5,90	5,86

Sumber: BPS data olahan

Pertumbuhan ekonomi tersebut tentu dipengaruhi oleh berbagai dinamika ekonomi yang terjadi di 29 kabupaten dan 9 kota yang ada di Jawa Timur. Salah satu tolok ukur dinamika ekonomi yang terjadi di masing-masing wilayah kabupaten/kota tersebut adalah PDRB dengan berbagai varian ukuran ekonomi lain yang diturunkannya. Pertumbuhan ekonomi (*growth*) merupakan ukuran yang paling lazim digunakan untuk mengetahui perkembangan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah tertentu dari waktu ke waktu.

Dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara nasional, tingkat kemiskinan di Jawa Timur masih tergolong relatif tinggi. Persentase penduduk miskin di Jawa Timur memang mengalami penurunan dari tahun ke tahun, mulai dari 18,51% pada Maret 2008 menjadi 12,73% pada Maret 2013. Akan tetapi selama periode tersebut persentase penduduk miskin Jawa Timur masih lebih tinggi daripada persentase penduduk miskin nasional yang terus menurun dari 15,42% pada Maret 2008 menjadi 11,37% pada Maret 2013. Data persentase penduduk miskin selama tahun 2008-2013 dapat dilihat pada Tabel 1.4 halaman 8.

Tabel 1.4  
Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Timur dan  
Indonesia Tahun 2008-2013 (%)

Tahun	Jatim	Nasional
2008	18,51	15,42
2009	16,68	14,15
2010	15,26	13,33
2011	14,23	12,49
2012	13,40	11,96
2013	12,73	11,37

Sumber: BPS (<http://www.bps.go.id/>)

Masalah lain yang dihadapi Jawa Timur terkait kemiskinan adalah adanya beberapa wilayah dengan kemiskinan tinggi yang tidak pernah berubah selama periode 2008-2013. Wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur dengan tingkat kemiskinan absolut tinggi pada tahun 2008 sampai 2013 adalah kabupaten Malang, kabupaten Sampang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sumenep, kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Kediri. Wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur dengan tingkat kemiskinan absolut rendah pada tahun 2008 sampai 2013 adalah Kota Mojokerto, Kota Batu, Kota Blitar dan Kota Madiun. Data jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Timur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.5 halaman 9.

Permasalahan ini juga menjadi catatan tersendiri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014 yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Madura. Diluar Pulau Madura, kabupaten yang jumlah penduduk miskinnya relatif besar adalah Tuban, Ngawi, Bojonegoro, Nganjuk, Lamongan dan Pacitan.



Tabel 1.5.  
Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota Di Provinsi Jawa Timur  
Tahun 2008-2013 (Ribu Jiwa)

NO	Kab/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kabupaten Pacitan	114,4	102,9	105,4	98,7	93,6	92,8
2	Kabupaten Ponorogo	144,5	127,5	113,0	105,9	100,4	99,5
3	Kabupaten Trenggalek	135,2	119,6	108,0	101,2	96,0	95,1
4	Kabupaten Tulungagung	119,1	102,0	105,4	98,7	93,6	92,8
5	Kabupaten Blitar	150,8	136,8	135,5	126,9	120,3	119,2
6	Kabupaten Kediri	265,5	239,9	232,8	218,1	206,8	204,9
7	Kabupaten Malang	353,3	318,9	306,8	287,4	272,5	270,0
8	Kabupaten Lumajang	180,7	157,8	140,8	131,9	125,1	124,0
9	Kabupaten Jember	399,5	348,1	311,8	292,1	277,0	274,5
10	Kabupaten Banyuwangi	206,8	181,0	175,1	164,0	155,5	154,1
11	Kabupaten Bondowoso	152,6	138,7	131,9	123,6	117,2	116,1
12	Kabupaten Situbondo	108,9	96,8	105,2	98,6	93,5	92,7
13	Kabupaten Probolinggo	305,1	280,1	276,7	259,2	245,8	243,6
14	Kabupaten Pasuruan	253,5	219,4	199,3	186,7	177,0	175,4
15	Kabupaten Sidoarjo	144,5	120,9	145,5	136,3	129,3	128,1
16	Kabupaten Mojokerto	142,6	130,1	125,4	117,5	111,4	110,4
17	Kabupaten Jombang	205,6	182,5	166,5	156,0	147,9	146,6
18	Kabupaten Nganjuk	191,9	167,3	151,7	142,1	134,7	133,5
19	Kabupaten Madiun	115,3	105,7	102,3	95,8	90,8	90,0
20	Kabupaten Magetan	95,1	84,7	80,3	75,0	71,1	70,5
21	Kabupaten Ngawi	169,0	154,1	149,2	137,8	130,7	129,5
22	Kabupaten Bojonegoro	292,7	262,0	227,2	212,9	201,9	200,1
23	Kabupaten Tuban	270,5	241,0	225,8	211,5	200,6	198,8
24	Kabupaten Lamongan	259,7	235,9	220,6	206,7	196,0	194,2
25	Kabupaten Gresik	248,8	225,8	193,9	181,7	172,3	170,7
26	Kabupaten Bangkalan	304,0	287,6	255,6	239,5	227,1	225,1
27	Kabupaten Sampang	302,8	285,0	285,5	267,5	253,7	251,4
28	Kabupaten Pamekasan	213,6	201,0	179,2	167,9	159,2	157,8
29	Kabupaten Sumenep	290,6	265,0	256,7	242,5	230,0	227,9
30	Kota Kediri	30,7	27,5	24,9	23,3	22,1	21,9
31	Kota Blitar	12,0	9,8	10,1	9,5	9,0	8,9
32	Kota Malang	57,2	44,4	48,5	45,4	43,1	42,7
33	Kota Probolinggo	51,3	47,1	41,4	38,8	40,5	40,1
34	Kota Pasuruan	18,9	15,8	16,8	15,7	14,9	14,8
35	Kota Mojokerto	9,8	7,9	8,9	8,3	7,9	7,8
36	Kota Madiun	11,6	10,3	10,4	9,7	9,2	9,1
37	Kota Surabaya	209,9	171,2	195,7	183,3	173,8	172,2
38	Kota Batu	11,3	8,8	9,7	9,1	8,6	8,5

Sumber: BPS 2012

Dalam pembangunan ekonomi ada juga saat-saat kegagalan pemerintah membangun ekonomi, kegagalan pertumbuhan ekonomi meretas kemiskinan

cenderung disebabkan oleh gagalnya pemerintah dalam mengelola laju pertumbuhan ekonomi. Kegagalan pemerintah dalam mengatur sistem pemberian upah padahal upah adalah sumber penghasilan, bila sumber penghasilan turun atau tetap maka kesejahteraan juga turun atau tetap dan itu juga pasti mempengaruhi tingkat kemiskinan. Para pekerja menjadi salah satu pendorong gagalnya pertumbuhan ekonomi meretas kemiskinan. Pekerja di Indonesia mengalami apa yang disebut “upah besi”, dimana para pekerja diberikan upah sesuai dengan kontrak kerja yang telah diputuskan bersama antara pengusaha dan pekerja (buruh).

Upah yang diberikan ternyata secara riil nilainya sangat rendah meskipun secara nominal angkanya mungkin cukup tinggi. Penetapan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah secara tidak sadar telah membuat para pekerja berada dalam kondisi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (primer) yang semakin hari mengalami fluktuasi harga (inflasi). Dampak dari upah besi juga berdampak pada penjatahan pekerjaan oleh pengusaha. Ini dikemukakan oleh Charles Brown (1998). Ia mengatakan bahwa penentuan upah besi akan berdampak pada penjatahan pekerjaan yang akan berdampak pada semakin banyaknya pengangguran.

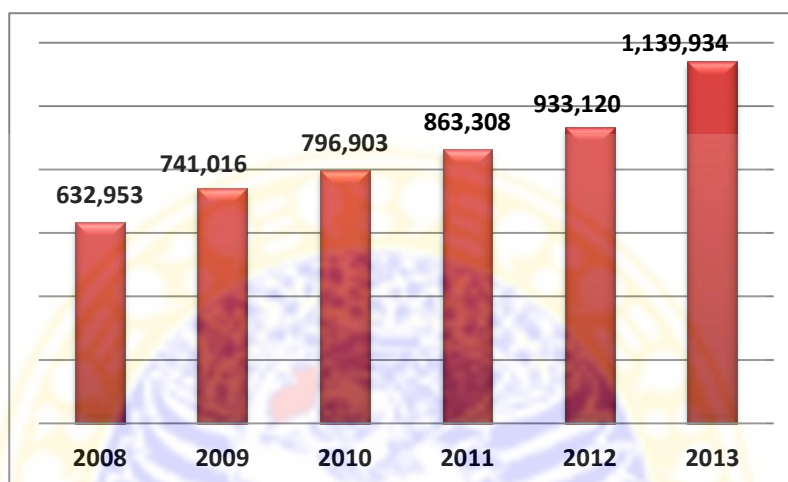
Gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan dikembangkan sejak awal tahun 1970-an bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang, besarnya upah minimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM). Hal ini diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk

memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarga dan sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan buruh (Sumarsono, 2003:39).

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah adalah kebijakan yang diterapkan dengan tujuan sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak dieksploitasi dalam bekerja dan mendapat upah yang dapat memenuhi KHM. Jika KHM dapat terpenuhi, maka kesejahteraan pekerja meningkat dan terbebas dari masalah kemiskinan.

Peraturan Menteri Nomor 17, tahun 2005 (Per-17/Men/VIII/2005) mengenai standart kebutuhan hidup layak (KHL) yang didefinisikan sebagai standar kebutuhan yang harus dipenuhi seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak, baik fisik, non fisik, dan sosial selama satu bulan. Seorang pekerja dianggap hidup layak jika upahnya mampu memenuhi kebutuhan 3000 kalori per hari. KHL menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan upah minimum. Ada 7 komponen KHL yang selalu dihitung, yaitu makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta rekreasi dan tabungan. Gambar 1.1 halaman 12 menunjukkan bahwa sampai tahun 2013 tingkat upah minimum Provinsi di Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 tingkat upah minimum sebesar

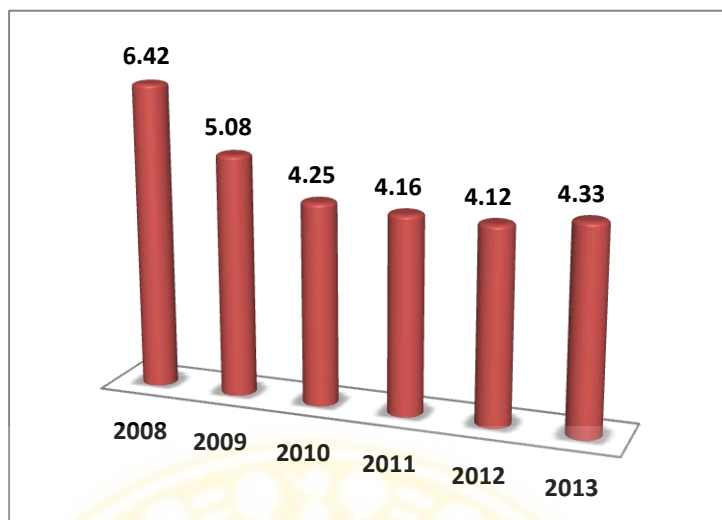
Rp. 632.953, kemudian naik menjadi Rp. 741.016 di tahun 2009 dan Rp. 796.903 di tahun 2010. Kenaikan juga terjadi di tahun 2011 yakni Rp. 863.308, di tahun 2012 naik lagi menjadi Rp. 933.120 dan di tahun 2013 naik lagi menjadi Rp. 1.139.934.



Sumber: Disnaker 2013

Gambar 1.1  
Perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Jawa Timur  
Tahun 2008-2013 (rupiah)

Dalam sudut pandang makro ekonomi, pengangguran yang tinggi merupakan masalah. Salah satu gambaran dampak dari tingginya tingkat pengangguran adalah akan banyaknya sumber daya yang terbuang percuma dan pendapatan masyarakat berkurang (Samuelson dan Nordhaus, 2010: 285-300). Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang tercipta sebagai akibat pertambahan lapangan kerja yang lebih rendah dari pertumbuhan tenaga kerja. Akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan.



Sumber: BPS (<http://www.bps.go.id/>)

Gambar 1.2  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur  
Tahun 2008-2013 (%)

Gambar 1.2 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur yang mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2008, tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,42%, kemudian turun menjadi 5,08% pada tahun 2009. Penurunan tingkat pengangguran juga terjadi secara beruntun dari tahun 2010, 2011 dan 2012, dari 4,25 pada tahun 2010 menjadi 4,16 di tahun 2012 dan 4,12 pada tahun 2012. Pada tahun 2013, tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 4,33%.

Menurut Todaro (2006:99) teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan



seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Sitepu dan Sinaga, 2004).

Todaro (2006:148) juga mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa (Suryawati, 2005).

Salah satu indikator kualitas pendidikan di suatu wilayah adalah rata-rata lama sekolah (BPS, 2012). Semakin besar rata-rata lama sekolah dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan semakin meningkat. Di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, kualitas pendidikan penduduk juga relatif rendah. Kabupaten Sampang, Bangkalan, Sumenep, Bondowoso dan Probolinggo merupakan daerah dengan rata-rata lama sekolah terendah di Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya rata-rata lama sekolah di daerah tersebut yang lama waktunya antara dari tahun 2008-2013 hanya berkisar antara 4,08 - 5,61 tahun. Sementara di daerah lain rata-rata lama sekolah mencapai 6 tahun atau lebih. Daerah dengan rata-rata lama sekolah terlama antara lain adalah Kota Blitar, Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kota Kediri, Kota Madiun dan Kota Malang. Di daerah-daerah tersebut rata-rata lama sekolah mencapai 9,73 - 10,74 tahun selama tahun 2008-2013. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.6 halaman 16.

Meskipun demikian rata-rata lama sekolah seluruh Jawa Timur dan di masing-masing kabupaten/kota terus meningkat dari tahun ke tahun. Data BPS (2012) pada Tabel 1.7 halaman 17 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah Jawa Timur mengalami peningkatan dari 6,95 tahun pada tahun 2008 menjadi 7,53 tahun pada tahun 2013. Idealnya rata-rata lama sekolah yang semakin meningkat ini disertai dengan tingkat kemiskinan yang juga semakin membaik. Sebagaimana uraian sebelumnya, tingkat pengurangan kemiskinan Jawa Timur selama tahun 2008-2013 cenderung menurun. Perkembangan rata-rata lama sekolah dan penurunan jumlah penduduk miskin Jawa Timur selama periode tahun 2008-2013 dapat dilihat pada Tabel 1.7 halaman 17.

Tabel 1.6  
Rata-Rata Lama Sekolah Kab/Kota Di Provinsi Jawa Timur  
Tahun 2008-2013 (tahun)

NO	Kab/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
1	Kabupaten Pacitan	6,63	6,71	6,90	6,94	6,96	6,88	6,84
2	Kabupaten Ponorogo	6,46	6,61	6,68	6,99	7,18	7,49	6,90
3	Kabupaten Trenggalek	7,05	7,19	7,24	7,26	7,31	7,29	7,22
4	Kabupaten Tulungagung	7,50	7,80	7,84	7,85	7,95	7,86	7,80
5	Kabupaten Blitar	7,09	7,23	7,35	7,36	7,40	7,22	7,28
6	Kabupaten Kediri	7,45	7,59	7,60	7,69	7,72	7,75	7,63
7	Kabupaten Malang	6,66	6,80	6,80	7,02	7,08	7,08	6,91
8	Kabupaten Lumajang	5,90	6,03	6,10	6,41	6,43	6,52	6,23
9	Kabupaten Jember	6,29	6,45	6,53	6,73	6,79	6,28	6,51
10	Kabupaten Banyuwangi	6,68	6,81	6,85	6,89	7,25	7,12	6,93
11	Kabupaten Bondowoso	5,20	5,49	5,54	5,66	5,94	5,65	5,58
12	Kabupaten Situbondo	5,68	5,99	6,18	6,19	6,22	6,05	6,05
13	Kabupaten Probolinggo	5,00	5,08	5,57	5,80	5,92	6,31	5,61
14	Kabupaten Pasuruan	6,16	6,33	6,34	6,54	6,83	6,83	6,51
15	Kabupaten Sidoarjo	9,49	9,78	9,84	9,85	9,92	10,23	9,85
16	Kabupaten Mojokerto	7,67	7,79	7,81	7,82	7,94	8,22	7,88
17	Kabupaten Jombang	7,48	7,76	7,77	7,84	8,04	8,03	7,82
18	Kabupaten Nganjuk	6,83	7,11	7,19	7,44	7,61	7,36	7,26
19	Kabupaten Madiun	6,72	6,96	7,38	7,39	7,44	7,39	7,21
20	Kabupaten Magetan	7,41	7,55	7,57	7,60	7,85	7,76	7,62
21	Kabupaten Ngawi	6,14	6,34	6,36	6,99	7,02	6,94	6,63
22	Kabupaten Bojonegoro	6,39	6,53	6,66	6,68	6,72	6,68	6,61
23	Kabupaten Tuban	6,09	6,22	6,41	6,49	6,53	6,82	6,43
24	Kabupaten Lamongan	6,76	7,03	7,19	7,46	7,59	7,79	7,30
25	Kabupaten Gresik	8,40	8,49	8,53	8,84	8,98	8,91	8,69
26	Kabupaten Bangkalan	5,00	5,13	5,16	5,30	5,74	5,66	5,33
27	Kabupaten Sampang	3,77	3,93	3,95	4,20	4,22	4,39	4,08
28	Kabupaten Pamekasan	5,72	5,73	6,11	6,32	6,32	6,63	6,14
29	Kabupaten Sumenep	5,01	5,20	5,63	5,64	5,71	5,43	5,44
30	Kota Kediri	9,66	10,00	10,20	10,21	10,24	10,02	10,06
31	Kota Blitar	9,55	9,71	9,72	9,75	9,77	9,87	9,73
32	Kota Malang	10,80	10,82	10,83	10,84	10,87	10,27	10,74
33	Kota Probolinggo	8,29	8,35	8,52	8,53	8,67	8,79	8,53
34	Kota Pasuruan	8,74	8,81	8,85	8,96	9,05	8,89	8,88
35	Kota Mojokerto	9,66	9,67	9,97	9,98	10,11	9,94	9,89
36	Kota Madiun	10,17	10,38	10,43	10,44	10,46	10,94	10,47
37	Kota Surabaya	9,84	9,94	9,95	10,08	10,10	9,94	9,98
38	Kota Batu	8,20	8,34	8,51	8,52	8,54	8,76	8,48
	Jawa Timur	6,95	7,20	7,24	7,36	7,45	7,53	7,29

Sumber: BPS Jatim 2012, diolah

Tabel 1.7.  
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Persentase Penduduk Miskin  
Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2013

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Penduduk Miskin (%)
2008	6,95	18,51
2009	7,20	16,68
2010	7,24	15,26
2011	7,36	14,23
2012	7,45	13,40
2013	7,53	12,73

Sumber: BPS

Dalam rangka mempercepat upaya pengentasan masyarakat miskin, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan daerah sesuai dengan karakteristik dan sumber daya masing-masing. MDG's (*Millenium Development Goals*) muncul sebagai akibat kemiskinan dan kelaparan yang masih terus melanda di negara-negara berkembang di dunia menyebabkan FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB) prihatin dan kemudian menggagas program MDG's yang harus mencapai tujuannya pada tahun 2015, terutama dalam hal pengurangan kemiskinan menjadi setengahnya pada tahun 2015. Hingga dibutuhkan suatu upaya melalui Pemerintah Daerah untuk melakukan suatu inisiasi dalam bentuk program-program pengentasan kemiskinan sebagai suatu bentuk kontribusi dalam meminimalisir angka kemiskinan Nasional (Husna dan Hermawan, 2010).

Menurut Bappeda Provinsi Jawa Timur (2010), kelemahan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di masa lalu antara lain:

- 1) berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro;



- 2) kebijakan terpusat;
- 3) lebih bersifat karitatif;
- 4) memposisikan masyarakat sebagai objek;
- 5) cara pandang tentang kemiskinan yang diorientasikan pada ekonomi; dan
- 6) asumsi permasalahan dan penanggulangan kemiskinan yang sering dipandang sama.

Menurut Singarimbun (1976:12-13), kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensi tidak dapat dipandang dari satu sisi saja dikarenakan kemiskinan memiliki permasalahan yang saling kait mengkait, namun dalam penelitian ini variabel yang dipilih adalah variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan pendidikan, oleh karena itu hasil dari penelitian ini tidak dapat di-*generalisir* secara umum.

Melalui berbagai uraian diatas, menunjukkan perlunya suatu penelitian yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, tidak hanya faktor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga faktor-faktor lain di luar pertumbuhan ekonomi, seperti faktor upah, faktor tingkat pengangguran terbuka dan faktor pendidikan. Dalam penelitian ini ketiga variabel tersebut didekati dan dinyatakan dalam variabel upah, variabel tingkat pengangguran terbuka dan variabel pendidikan. Berdasarkan berbagai latar belakang tersebut, tesis ini diberi judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2013”.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan pendidikan secara signifikan berpengaruh secara simultan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan pendidikan secara signifikan berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan pendidikan secara signifikan berpengaruh secara simultan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan pendidikan secara signifikan berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.
2. Sebagai masukan pemikiran kepada pembuat kebijakan dan pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi tingkat jumlah penduduk miskin di wilayah Provinsi Jawa Timur.
3. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mempelajari masalah kemiskinan di Jawa Timur.
4. Dapat memberikan kontribusi bagi kajian mengenai pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan pendidikan baik di tingkat nasional maupun regional.

#### 1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan proposal tesis terbagi dalam 4 bab yang saling berkaitan dan disesuaikan dengan materi pembahasan. Dimulai dari Bab 1 yang membahas latar belakang penelitian sampai Bab 4 yang merupakan metode penelitian. Kerangka pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

##### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab 1 ini membahas mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penulisan tesis, rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian serta sistematika penulisan tesis.

## **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab 2 ini berisi informasi mengenai penelitian sebelumnya yang dapat mendukung penelitian ini, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri serta teori-teori yang mendukung penelitian ini.

## **BAB 3 : KERANGKA KONSEPTUAL**

Bab 3 ini menjelaskan kerangka konseptual penelitian yang dibentuk dari latar belakang penelitian, teori-teori, artikel serta informasi kebijakan. Dari informasi ini akan terbentuk model yang tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah diajukan.

## **BAB 4 : METODE PENELITIAN**

Bab 4 ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Adapun bagian-bagian dari metode penelitian tersebut terdiri dari jenis atau rancangan penelitian yang digunakan, penentuan populasi dan teknik pengambilan sampel, klarifikasi variabel dan definisi operasional, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis.

## **BAB 5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab 5 ini menjelaskan tentang pembahasan hasil penelitian dengan cara mengungkapkan hasil perhitungan uji hipotesis. Adapun bagian-bagian dari analisis dan pembahasan hasil penelitian terdiri dari gambaran umum obyek penelitian, analisis model dan pembuktian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

## **BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab 6 ini menjelaskan tentang temuan penelitian dan saran baru yang diperlukan untuk diungkapkan apabila terdapat hasil penelitian yang berbeda dengan realitas yang ada. Saran juga merupakan temuan baru yang perlu diketahui atau berupa anjuran perlunya penelitian lanjutan.

